

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada 17 April 2019, Indonesia dihadapkan dengan Pemilu serentak. Masyarakat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tentu ini menjadi momentum pesta demokrasi terbesar setiap lima tahun sekali di Indonesia. Terkait perhelatan ini, yang paling menarik perhatian publik adalah persaingan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dimana masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih presidennya sendiri. Ada dua pasangan calon yang bertarung memperebut kursi Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan Prabowo- Sandiga Uno, dan pasangan Jokowi-Mahruf Amin. Dimana Joko Widodo sebagai petahana, dengan demikian publik pun terpecah menjadi dua kubu pada perhelatan politik tersebut.

Televisi memainkan peran penting dalam memproduksi informasi yang berimbang untuk menjaga netralitas dan menjadi kontrol terhadap politik nasional. Ini menjadi tantangan bagi pers Indonesia untuk mempraktikkan jurnalisme yang profesional serta independen. Sebagaimana fungsinya dalam tahun politik, media wajib menjernikan informasi untuk membantu publik dalam memilih dan menentukan sikap politiknya. Oleh sebab itu, media harus menjunjung tinggi kode etik jurnalismenya yakni jujur, transparan, objektif dan akurat, bukan menjadi perpanjangan kepentingan partai politik dan propaganda politik yang membuat publik menjadi semakin terbelah dalam sikap politiknya.

Sebagai salah satu pilar penting demokrasi, media wajib terlibat dalam setiap perkembangan dinamika politik. Dengan demikian tentu masyarakat pun akan selalu mengikuti setiap informasi yang diproduksi oleh media karena dianggap sebagai sarana paling efektif dalam memproduksi pesan.

Media elektronik (TV) sanggup menyajikan informasi berupa suara, video, teks dan interaktif dengan penonton. Hasil penelitian Dewan Pers yang berjudul mengungkap Independensi media, menunjukkan bahwa televisi mempunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku publik serta mampu menyentuh aspek psikologi khayalak dimanapun dan kapanpun. (*Jurnal Dewan Pers edisi no. 9, juni 2014*).

Dalam tahun politik seperti Pemilu, media – media nasional sangat intens dan rutin menyoroti dinamika politik, terutama televisi berita seperti TV ONE, Metro TV, Inews TV, CNN Indonesia, Kompas TV, Jak TV, dan CBN Indonesia. Informasi yang disajikan itu diformat dalam bentuk diskusi, debat, talk show dan opini. Keterlibatan media ini tentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai informasi politik nasional. Terbukti dari tahun ke tahun dan dari periode ke periode, keterlibatan media televisi dalam memproduksi informasi politik nasional kepada publik terus meningkat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam konsideran huruf (c) pun telah diatur tentang prinsip larangan intervensi (campur tangan) dan paksaan dalam bentuk apapun kepada pers. Ini harus menjadi kata kunci tentang pers yang independen, meskipun prinsip ini secara konstitusional masih harus dipertegas dengan undang-undang organiknya yang memuat sanksi yang patut dan adil terhadap pelanggaran norma independensi pers tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, dalam seminar Tempo Media Week 2016 yang bertajuk "Inovasi dan Independensi Media Era Digital di Indonesia bahwa independensi dalam jurnalisme adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan orang lain. Media independen harus menjadi media mandiri, merdeka, dan tidak bergantung kepada pihak manapun untuk mempertahankan prinsip kebenaran. Artinya bahwa, di dalam independensi

ada netralitas, dan kebenaran jurnalistik bukanlah bersifat mutlak, tetapi kebenaran yang bersifat fungsional. Pentingnya independensi media juga dikemukakan oleh Direktur Utama Tempo Media Tbk, Bambang Harymurti. Dalam paparannya, Bambang menjelaskan bahwa pers yang independen menunjukkan negara yang demokratis. Sebab itu, media harus menjadi netral dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Pada dasarnya, independensi media adalah sebuah konsep yang sangat rumit. Secara umum, independensi adalah ide bahwa wartawan harus bebas dari bentuk campur tangan apapun ketika menjalankan dan mempraktekan profesinya. Di berbagai negara, pemilik media yang terbesar (umumnya pemilik stasiun televisi dan radio terkemuka) adalah pemerintah sendiri. Hal ini seakan meremehkan konsep independensi media dari pengaruh intervensi negara. Upaya yang perlu dijalankan untuk memperkuat independensi media adalah dengan menjadikan media milik publik atau yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi milik swasta. Selain itu, perlu dikembangkan sistem untuk mengembangkan keanekaragaman dalam kepemilikan media, sehingga persaingan yang terjadi diantara media dapat mendorong berbagai prespektif tentang kebijakan publik dan membatasi kekuasaan politik konglomerat media.

Sekalipun saat ini banyak media yang dimiliki oleh swasta, namun independensi media justru masih menjadi persoalan yang dipolemikan, terutama di tahun politik 2019, dengan berlangsung Pilpres. Persoalan tersebut adalah keberpihakan media televisi terhadap partai politik atau kandidat calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu : Joko Widodo – Ma'aruf Amin dan juga Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Selama masa kampanye, Dewan Pers mengingatkan pemilik media untuk tetap menjaga netralitas pemberitaan terkait Pemilu bahkan pemimpin media diminta agar tidak memasukan unsur politik atau konflik kepentingan dalam pemberitaan. Dewan Pers pun menyetujui bahwa para pemilik media boleh berpolitik praktis tetapi independensi ruang redaksi harus selalu dijaga, hal ini

disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Gedung Dewan Pers, Jumad 19/01/2018.

Yosep juga mengatakan sebagai sebuah badan usaha, media tidak dapat lepas dari motif ekonominya. Yang penting, kata dia, para pekerja media dapat profesional. “Integritas wartawannya, integritas pengelola newsroom, harus dijaga. Kalau itu ditegakkan, pemilik tidak akan mendikte pers,” katanya menegaskan (*Suara.com, 2018*).

Selain itu, forum pemimpin redaksi pun telah mendeklarasikan komitmen untuk menjaga netralitas selama pemilu 2019. Forum pemret berkomitmen menjaga kode etik jurnalistik dan objektivitas pemberitaan, serta memberikan porsi seimbang kepada semua peserta pemilu 2019. Ini berarti, media harus menempatkan diri sebagai alat kontrol dan referensi yang jujur ditengah godaan afiliasi politik.

Terkait independensi media televisi, hasil riset lembaga penelitian Remotivi untuk sepuluh televisi menunjukkan bahwa televisi yang pemiliknya berafiliasi dengan dengan partai politik itu terbukti tidak independen. Hal ini dilihat dua hal yakni pertama, proporsi pemberitaannya lebih tinggi dan condong pada partai dimana pemiliknya berafiliasi; kedua yaitu pemberitaan negatif tentang lawan politik. (*bbc.indonesia/com/2014*).

Ini berarti ada polarisasi politik yang dihasilkan dari pertarungan politik dan media nyatanya berkontribusi terhadap pembelahan politik karena ketidakberimbangan dan tidak independennya pemberitaan yang disiarkan. Media terjebak dalam pertarungan politik Pilpres sebab media merupakan faktor pokok dalam strategi meraih opini publik, dan tanpa media, tidak akan ada opini publik.

Salah satu format pemberitaan yang menarik dibahas adalah program Editorial Media Indonesia. Program ini Namun program Editorial Media Indonesia kemudian dielektronikkan, dibuat berupa program editorial yang ditampilkan di Metro TV, pada pukul 07.00 WIB. Dan diisi oleh para penulis Editorial Media Indonesia Koran. Topik pembahasan mereka selalu berputar pada isu sosial dan politik yang dirangkum menjadi sikap atau pandangan

mereka terhadap isu yang diangkat. Beberapa edisi tampak ada kecenderungan program editorial media Indonesia membahas secara berturut – turut terkait pemilu yang menitik beratkan pada isu pasangan tertentu. Dari pilihan diksi dan wacana serta teks dalam sudut pandang yang ditampilkan ke public secara visual serta audio, penulis menduga ada keberpihakan karena memberikan ruang yang banyak dan juga narasi yang dibangun cenderung menguntukan pasangan tertentu dibandingkan pasangan yang lain.

Untuk melihat apakah Metro TV, dalam hal ini program Editorial Media Indonesia mengemas isu politik pada Pilpres 2019 dengan independen sesuai dengan fungsinya atau sebaliknya. Dengan pertanyaan itulah maka penulis tertarik untuk mempersoalkan dan melihat kebenarannya.

B. Perumusan Masalah

Media Televisi adalah media yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan kebutuhan informasi kepada masyarakat secara berimbang dalam hal kontrol sosial dan sebagai pilar demokrasi. Apa yang telah dilakukan oleh program editorial media indonesia justru telah menunjukkan fungsi yang sebaliknya, yaitu cenderung bepihak dalam menyajikan informasi berita maupun opini yang tidak berimbang sebagai pilar demokrasi.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran media sebagai pilar demokrasi yang yang wajib menjunjung tinggi independensi ruang redaksi dan presntasi informasi di ruang publik, dalam program editorial media indonesia terkait isu pilpres 2019. Pembentukan teks terhadap berita maupun opini tentang isu pilpres 2019 yakni cara media memaknai, memahami, dan membingkai peristiwa isu, menafsirkan makna dari suatu teks pada dinamika politik nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Independensi program Editorial Media Indonesia dalam menyiarkan isu Pemilihan Presiden 2019”.

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk memperoleh atau menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan atau dijelaskan sebelumnya. Dilihat dari permasalahan diatas maka peneliti mengemukakan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui bagaimana Independensi program Editorial Media Indonesia dalam menyiarkan isu calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Independensi Editorial Media, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pengembangan akademis yang baik bagi dunia pendidikan khususnya jurusan Ilmu Komunikasi dalam melihat peran media serta memecahkan masalah yang tepat dengan menggunakan alat pemecah masalah yang tepat juga.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini setiap tenaga jurnalistik yang terkhusus wartawan media Indonesia yang akan, pernah atau sedang menulis dan menyiarkan isu politik nasional tentang pilpres, atau awak media yang bekerja dalam media massa apapun pada saat ini dapat mengikuti kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers yang berlaku. Sehingga sikap atau opini yang disajikan berimbang dan tidak memberikan keberpihakan satu kelompok tertentu.

3. Manfaat Sosial

Selain manfaat akademis dan manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial, yaitu untuk

memberikan pengetahuan dan menyadarkan untuk mempersoalkan peran media nasional yang tidak independen saat menyajikan informasi lewat berita maupun opini. Sehingga dengan adanya penelitian ini, setiap khalayak masyarakat dan dapat menyimak dengan bijak dalam memaknai setiap berita atau opini yang ditampilkan dalam setiap penyiaran. Bahwa opini atau pemberitaan program Editorial Media Indonesia terkait Pilpres wajib dipersoalkan peran dan fungsi sebagai pilar demokrasi. Ada sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh jurnalis dalam berpendapat dan menampilkan informasi tentang Pilpres 2019 pada Program Editorial Media Indonesia, karena itu masyarakat yang menyimak program Editorial Media Indonesia harus tahu bahwa sikap yang seperti itu tidak tepat dan tidak seharusnya dilakukan.

E. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian dapat terarah dan sistematis, maka diperlukan cara penyusunan terstruktur. Dengan sederhana peneliti menyusun penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum permasalahan yang mendorong penelitian dan penulisan penelitian ini. Berisi tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori, kerangka teori, konsep dan kerangka berpikir. Terdapat teori, asumsi, paradigma, dan konsep masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti terdahulu dan kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel atau informan, teknik analisis data, teknik interpretasi data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian. Hasil analisisnya dijabarkan dan dinyatakan dalam bentuk data. Pembahasan menggunakan teori sebagai pisau analisis dan juga interpretasi.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup yang dibahas tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk peninjauan selanjutnya.

